

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	3
---	---	---	---



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Sherly Keberatan Tarif Sewa

Gambir, Warta Kota

Warga Kampung Bayam, Tanjung Priok, Jakarta Utara yang menjadi korban pengurusan dari proyek Jakarta International Stadium (JIS) melayangkan surat ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada Senin (20/2).

Tidak hanya itu pada saat yang bersamaan puluhan warga tergabung dalam Persaudaraan Warga Kampung Bayam (PWKB) sejumlah warga Kampung Bayam juga menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta.

Kedatangan warga yang didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta itu untuk melayangkan surat keberatan administratif kepada Pemprov DKI terkait Rusun Kampung Bayam.

Sampai saat ini sejumlah warga yang menjadi korban pengurusan dari proyek JIS belum menempati Rusun Kampung Bayam seperti yang dijanjikan. Jihan mengatakan, surat dari warga Kampung Bayam berisi empat tuntutan yang diharapkan segera dipenuhi oleh Pemprov DKI Jakarta dan PT Jakpro.

Menurut Pengacara Publik LBH Jakarta, Jihan Fauziah Hamdi, setidaknya terdapat 123 Kartu

Keluarga (KK) yang hingga saat ini masih tinggal di tenda-tenda. Kemudian kata Jihan, perubahan tarif pengenaan per bulannya selalu berubah. Yang sangat disayangkan adalah tidak adanya kepastian hukum.

Sementara itu, perwakilan PWKB, Sherly membeberkan bahwa seharusnya hal-hal administratif dan teknis seperti itu diberikan sejak diresmikan pada 12 Oktober 2022. "Karena kami kan sudah punya SK penghuni, dan kami sudah dapat nomor unit. Tapi sampai saat ini kami belum bisa masuk karena belum ada kesepakatan terkait harga sewanya," kata Sherly.

Sherly menginformasikan saat itu PT Jakpro meminta harga sewa Rp 1.500.000 per bulan. Namun ia mengaku, belum ada persetujuan dari para warga. "Pendapatan kami saja nggak sampai Rp 1.000.000 per bulan. Gimana kami membayar dengan harga sewa segitu? Kan nggak masuk akal. Dan itu mereka menetapkannya hanya sepihak. Tiba-tiba hanya disosialisasikan ke kami tanpa berdiskusi terlebih dahulu," ujar Sherly.

Menurut Sharly, permintaan keringanan tarif sewa Kampung Susun Bayam itu mengukur dari pendapatan para warga yang umumnya banyak sebagai pemulung dan pekerja pabrik. "Karena penghasilan kami, maaf saja yang namanya pemulung

juta," kata Sharly.

Sherly mengatakan, soal tarif sewa Kampung Susun Bayam itu, sebelumnya telah dibahas antara warga dengan PT Jakpro. Salah satunya soal nominal yang mampu dibayar. "Warga sih pengennya yang sesuai kemampuan kami. Dari pihak Jakpro pernah datang ke pihak kami untuk tulis kemampuan kami. Harusnya itu yang dijadikan acuan," kata Sherly.

Sherly mengatakan, selama ini warga Kampung Bayam terus dijanjikan PT Jakpro selaku pengelola Kampung Susun Bayam. Ia menyebut bahwa warga dijanjikan oleh PT Jakpro dapat menempati hunian Kampung Susun Bayam pada 20 November 2022.

Penawaran harga

VP Corporate Secretary PT Jakpro, Syachrial Syarif mengatakan, penawaran tarif sewa kepada mereka untuk menempati itu sudah disampaikan pada Desember 2022. Ia menyampaikan bahwa harga yang ditawarkan berkisar antara Rp 600.000 hingga Rp 700.000 per bulan (tergantung levelnya).

"Sementara teman-teman yang berdemo hari ini itu meminta harga yang lebih rendah dari itu," ucap Syachrial. Jadi, lanjutnya, secara garis besar, mereka terbagi menjadi dua kelompok. "Ada kelompok yang menerima dengan penawaran kami, ada

Terkaif dengan legalitas pengelolaan, Syachrial mengatakan pihaknya tengah berdiskusi dengan Pemprov DKI Jakarta. "Nah kalau harapannya, ada pengaturan khusus untuk yang komersial dan yang tidak. Kalau Kampung Susun Bayam ini kan tidak komersial, jadi merujuk ke harga itu tadi," kata Syachrial.

Sementara, Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta menegaskan bahwa inbreng atau penyerahan modal dalam bentuk aset lahan dirikannya Kampung Susun Bayam bukan ditolak, melainkan belum disetujui. "Itu bukan ditolak ya, tapi kami diminta untuk perbaikan," ujar Kepala Bidang Usaha Infrastruktur BP BUMD, Budi Purnama, Senin (20/2).

Sementara, Kepala Seksi Manajemen Aset Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta Rindu Manalu, menyatakan, Pemprov DKI Jakarta gagal menyerahkan modal dalam bentuk aset (inbreng) lahan tempat berdirinya Kampung Susun Bayam kepada PT Jakarta Propertindo.

Penyerahan modal dalam bentuk aset itu berujung gagal karena pengajuan inbreng tersebut ditolak DPRD DKI Jakarta. Agar bisa menyerahkan modal dalam bentuk aset tersebut kepada Jakpro, Pemprov DKI memang harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari legislatif Jakarta. (m36/

SEKILAS TENTANG KAMPUNG SUSUN BAYAM

- Proyek ini dimulai pada 7 Mei 2022
- Proses pembangunan memakan waktu 4 bulan 20 hari
- Berdiri di lahan seluas 17.354 meter persegi
- Memiliki tiga tower 4 lantai yang terdiri dari 138 unit
- Luas unit 36 meter persegi dan terdiri atas 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dapur ruang keluarga balkon dan ruang cuci pakaian
- Hunian ini mengusung konsep mezzanine
- Diperuntukan bagi warga Kampung Bayam yang terdampak proyek Jakarta International Stadium (JIS)

EMPAT TUNTUTAN WARGA KAMPUNG BAYAM

1 Meminta Pemprov DKI Jakarta segera memberikan unit rusun kepada warga Kampung Susun Bayam sebagai bentuk pemulihan hak bagi warga kampung bayam yang mengalami pengurusan.

2 Menjamin warga Kampung Bayam mendapat hunian di Kampung Susun Bayam dengan harga terjangkau dengan terlebih dahulu melakukan dialog atau diskusi serta mengutamakan kepentingan terbaik bagi warga Kampung Bayam sebagai korban pengurusan.

3 Menjamin warga mendapatkan hak pengelolaan Kampung Susun Bayam.

4 Menjamin terpenuhinya hak atas tempat tinggal yang layak bagi warga Kampung Bayam dengan tidak melakukan kembali pengurusan kepada warga yang saat ini diajukan belum mendapatkan hak atas unit Kampung Susun Bayam.